



## Pengaruh Kemiskinan Terhadap Kriminalitas Di Surabaya

<sup>1</sup>Fredella Tania Putri Fiyantika <sup>2</sup>Agus Budhi Santosa <sup>3</sup>Kiki Asmara

<sup>1,3</sup> Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”  
Jawa Timur <sup>2</sup>Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

### Abstrak

Received: 05 Oktober 2024  
Revised: 11 Oktober 2024  
Accepted: 19 Oktober 2024

*Terjadinya kejahatan disebabkan oleh berbagai faktor yang mendasarinya, salah satunya adalah kemiskinan. Terjadinya kejahatan saat ini sering kali dapat dikaitkan dengan keadaan seseorang yang miskin atau faktor lain yang terkait dengan sejarah mereka. Salah satu aspek yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya adalah kesejahteraan masyarakatnya, yang tercermin dari rendahnya tingkat kriminalitas di lingkungan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan kausalitas antara indikator kemiskinan dengan perilaku kriminalitas di Kota Surabaya, dengan menggunakan data dari Badan Pusat Statistik periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa kemiskinan, yang merupakan hasil dari faktor-faktor seperti kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan pendidikan, pendapatan, birokrasi, dan kondisi lingkungan yang tidak kondusif, menyebabkan terjadinya tindak kriminal. Pemerintah belum memberikan bantuan yang signifikan atau menerapkan langkah-langkah untuk mengatasi kemiskinan dan kriminalitas, yang berdampak pada ekonomi kota Surabaya, pengangguran, risiko konflik sosial, tingkat kematian, dan pertumbuhan pemukiman. Tingkat kriminalitas; Kemiskinan.*

### Kata Kunci:

(\*) Corresponding Author:

[21011010062@student.upnjatim.ac.id](mailto:21011010062@student.upnjatim.ac.id), [absantosa08@gmail.com](mailto:absantosa08@gmail.com),  
[kikyasmara25@gmail.com](mailto:kikyasmara25@gmail.com)

**How to Cite:** Fiyantika, F. T., Santosa, A., & Asmara, K. (2024). Pengaruh Kemiskinan Terhadap Kriminalitas di Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(19), 378-387. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14169980>.

## PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan fenomena global yang terjadi di hampir semua negara (Arvanites & Defina, 2006), karena masalah kemiskinan hampir terjadi di setiap negara di dunia. Permasalahan kemiskinan mewarnai proses pembangunan di suatu (Blyth, 2013). Sehingga permasalahan kemiskinan menjadi permasalahan sosial karena mereka yang tergolong miskin tidak mampu mengemban tanggung jawab seperti orang yang tidak miskin, tidak mampu menjalankan fungsi sosial, tidak mampu menempuh pendidikan yang bermutu, tidak memiliki taraf hidup yang baik, terbatasnya akses terhadap pelayanan kesehatan, dan akses terhadap pelayanan kesehatan atau pelayanan dasar lainnya (Green, 2016). Berbagai keterbatasan yang dihadapi masyarakat miskin dapat memicu berbagai permasalahan sosial, seperti kejahatan, pencurian, ketidaktaatan terhadap aturan, dan berbagai permasalahan sosial lainnya (Gull dkk., 2020).

Bank Dunia melaporkan bahwa penurunan 10% kasus pembunuhan di suatu negara akan meningkatkan PDB per kapita sebesar 0,7% hingga 2,9% selama lima tahun berikutnya bahkan setelah mengendalikan berbagai faktor penentu lainnya. Tingkat pembunuhan juga merupakan indikator penting bagi supremasi hukum (Hazra, 2020). Pembunuhan adalah dimensi penting dari disamenitas dan dapat

diremehkan jika formulasi modelnya salah (Huay & Bani, 2018). Tingkat pembunuhan yang tinggi juga menurunkan kepuasan warga negara terhadap demokrasi, yang akibatnya mengganggu institusi demokrasi dan pembangunan ekonomi lebih lanjut (Imran dkk., 2018). Para pembuat kebijakan di seluruh dunia memberlakukan undang-undang yang berdampak pada keselamatan publik, dan salah satu undang-undang yang kontroversial adalah 'Stand Your Ground' (Stand Your Ground) mengenai penggunaan kekerasan bersenjata (Kang, 2016).

Salah satu dari sekian banyak kota di Indonesia yang mengalami kemiskinan adalah Surabaya, yang merupakan bagian dari provinsi Jawa Timur. Upah minimum untuk karyawan di Surabaya adalah Rp 4.525.479,19, yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan kota-kota lain. Akibatnya, angka kemiskinan di Surabaya seharusnya dapat menurun jika upah ini diterapkan. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan adalah pendapatan.

Oleh sebab itu, sering kali dikatakan bahwa kelompok kaya mampu berinvestasi dalam tindakan perlindungan atau pencegahan, termasuk memasang sistem pengawasan, pindah ke komunitas yang lebih baik, dan memiliki mobil, dll., sehingga hubungan sebab akibat yang terbalik antara kejahatan properti dan ketimpangan pendapatan adalah juga dilemahkan oleh argumen seperti itu. Faktanya, seperti yang didokumentasikan oleh (Masterson & Yasenov, 2021) bahwa rumah tangga dengan pendapatan rendah (\$25.000 ke bawah) mempunyai peluang 60% lebih besar terkena pencurian dibandingkan rumah tangga berpenghasilan tinggi (\$50.000 ke atas).

Di Indonesia sendiri, ketimpangan merupakan hal yang lazim dan karakteristik antar provinsi dan pulau bisa sangat berbeda. Sebuah penelitian baru-baru ini di Indonesia menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan, yang diprosikan dengan rasio ini, berkontribusi terhadap peningkatan kejadian perampokan dan penipuan. Dengan menggunakan indeks Theil, (Nguyen, 2021) menemukan bahwa di dalam dan antar wilayah di Indonesia, ketimpangan pendapatan individu berdampak signifikan terhadap viktimisasi kejahatan. Demikian pula dengan pendekatan multi-regresi, (Ozden dkk., 2018) menemukan hubungan yang signifikan antara ketimpangan pendapatan, yang diprosikan dengan rasio Gini, dan kejahatan di Indonesia. Dengan menggunakan model autokorelasi spasial, (Huay & Bani, 2018) juga menemukan bahwa ketimpangan pendapatan yang lebih luas yang diprosi dengan indeks Gini berkorelasi dengan tingkat kejahatan yang lebih tinggi di Indonesia. Namun, masih belum diketahui apakah jenis ketimpangan tertentu, seperti kesenjangan dalam pengeluaran pangan dan non-makanan, telah menyebabkan tingkat kejahatan yang lebih tinggi.

Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui bagaimana kemiskinan mempengaruhi aktivitas Kriminal. Dalam penelitiannya mengenai kriminalitas di Surabaya, (Pradinie & Setiawan, 2011) menguraikan lebih lanjut bahwa perilaku kriminalitas dengan atribut struktural diyakini dipengaruhi oleh variabel-variabel yang signifikan seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketersediaan sumber daya. Di sisi lain, kriminalitas kultural diduga dipengaruhi oleh variabel seperti keragaman etnis dan disorganisasi sosial dalam masyarakat. Kemudian, studi dari (Sugiarti, 2014) menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan dan positif antara kejahatan dan kemiskinan. Kemiskinan memiliki potensi untuk berkontribusi pada aktivitas kriminal, termasuk pencurian, penggelapan, penipuan, dan penganiayaan. Sejalan dengan itu, penelitian

(Kuciswara dkk., 2021) juga memaparkan hal yang sama, yaitu menurut penelitian mereka menerangkan bahwa tingkat kemiskinan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kriminalitas. Di sisi lain, ketimpangan pendapatan memiliki dampak positif terhadap kriminalitas, namun dampaknya kecil. Lalu menurut penelitian (Lerabeni, 2022) menunjukkan bahwa kemiskinan, dan kejahatan meningkat sebagai akibat dari meroketnya biaya kebutuhan pokok, yang membuat masyarakat lebih sulit untuk bertahan hidup. Pencurian, perampokan, penjahretan, dan kegiatan kriminal lainnya adalah beberapa hal yang dipengaruhi oleh keadaan ekonomi.

Penelitian ini mencoba untuk melakukan analisis yang lebih menyeluruh tentang hubungan antara kemiskinan dan kegiatan kriminal yang terjadi di kota Surabaya, berdasarkan fenomena kemiskinan dan dampak dari masalah kemiskinan.

## **METODE**

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengkarakterisasi berbagai isu dan melakukan analisis mendalam lebih lanjut. Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana kemiskinan di Kota Surabaya berdampak pada kejahatan. Apakah kemiskinan berkontribusi terhadap penurunan angka kriminalitas atau justru sebaliknya, yang menyebabkan peningkatan angka kriminalitas? Selain itu, metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu studi tertulis yang menyediakan data untuk dianalisis. Kemudian pada penelitian ini terdapat 2 variabel, yakni tingkat kriminalitas di Surabaya sebagai variabel terikat (*dependent*) atau variabel yang dipengaruhi oleh adanya variabel bebas (*independent*) yaitu tingkat kemiskinan di Surabaya.

Teori yang terdefinisi dengan baik diperlukan untuk penelitian kualitatif ini karena teori tersebut nantinya akan menjelaskan isu-isu yang penulis teliti, menjadi landasan untuk mengembangkan hasil hipotesis, dan menjadi panduan untuk menyusun alat penelitian. Peneliti menggunakan tinjauan literatur, informasi yang dikumpulkan dari berbagai artikel jurnal, dan peristiwa terkini sebagai sumber data saat mengumpulkan data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Orang yang tidak dapat mencapai standar hidup minimum di komunitasnya dianggap miskin. Kemiskinan adalah kondisi tidak tercapainya standar hidup minimum dan hidup di bawah pendapatan minimum. Garis kemiskinan dapat diartikan sebagai standar hidup minimum di suatu daerah. Ketika harga-harga kebutuhan hidup terus meningkat, maka garis kemiskinan akan meningkat, dan ketika jumlah penduduk bertambah dan berkurang, maka jumlah penduduk miskin akan bertambah dan berkurang.

Ada beberapa penyebab kemiskinan, dan mengidentifikasi penyebab-penyebab tersebut tidaklah sulit. Kemiskinan muncul karena faktor-faktor tertentu. Namun, menemukan penyebab utama atau penyebab yang secara signifikan mempengaruhi perubahan kemiskinan merupakan hal yang menantang. Pembangunan yang tidak merata, kesenjangan pendapatan regional, kenaikan harga-harga kebutuhan, variasi regional dalam biaya hidup, kurangnya pemanfaatan sumber daya manusia dalam pengelolaan sumber daya alam, dan korupsi yang meluas adalah faktor-faktor yang berkontribusi terhadap

meningkatnya kemiskinan di dunia. Data kemiskinan yang akurat dari Survei Badan Pusat Statistik sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk mengatasi kemiskinan karena data tersebut dapat mendukung inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan mencapai Indonesia yang bebas dari kemiskinan (Taufiq & Tambunan, 2021).

Tabel 1 Garis kemiskinan, Jumlah dan presentase penduduk miskin, indeks

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Presentase Penduduk Miskin (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/kap/bulan)
2018	140,81	9,44	1,8	0,53	169.026
2019	130,55	4,51	0,62	0,15	567.474
2020	145,67	5,02	0,87	0,24	592.137
2021	152,49	5,23	0,75	0,17	611.466
2022	138,21	4,72	0,69	0,18	487.908

keparahan dan kedalaman konsumen, Tahun 2018 - 2022

Menurut survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, data kemiskinan di Surabaya berubah setiap tahunnya. Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa garis kemiskinan mengalami peningkatan dan penurunan secara dinamis dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Surabaya mencapai 130.550 jiwa dengan jumlah presentase 4,51%, angka tersebut menunjukkan bahwa penduduk miskin berkurang sebanyak 10.260 jiwa daripada tahun sebelumnya yaitu 140.810 jiwa dengan presentase 9,44%. Faktor yang mempengaruhi penurunan presentase penduduk miskin pada tahun 2019 yaitu karena terjadinya inflasi, komoditi makanan mengalami perubahan indeks harga konsumen (IHK) dan indeks upah buruh tanaman mengalami kenaikan. Selain jumlah dan presentase penduduk miskin, salah satu indikator penting penduduk miskin yaitu Tingkat kedalaman kemiskinan (P1). Tingkat kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Pada tahun 2019 tingkat kedalaman kemiskinan mengalami penurunan menjadi 0,62 poin dari 1,80 poin di tahun 2018 yang artinya pengeluaran penduduk miskin semakin dekat dengan garis kemiskinan. Salah satu indikator penting penduduk miskin selanjutnya yaitu Tingkat keparahan kemiskinan (P2) yaitu dengan melihat ketimpangan antar penduduk miskin, filosofinya ketika kondisi penduduk miskin relatif sama maka cara untuk mengentaskan kemiskinan hanya dengan menggunakan satu program yang sama. Seperti pada tahun 2018 dengan 0,53 poin dan tahun 2019 dengan 0,15 poin maka pada tahun 2019 menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan relatif berbeda.

Namun pada tahun 2020 kemiskinan Kembali meningkat mencapai angka 145.670 jiwa dengan presentase 5,02%. Faktor yang mempengaruhi meningkatnya angka kemiskinan yaitu karena adanya pandemi COVID – 19 yang membuat masyarakat terbatas melakukan aktifitas, adanya inflasi dan beberapa komoditi makanan mengalami perubahan indeks harga konsumen. Selanjutnya mengenai nilai indeks kedalaman konsumen (P1) dan nilai indeks keparahan kemiskinan (P2) mengalami kenaikan yang artinya indikasi rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin juga semakin melebar.

Di tahun 2021 kemiskinan terus meningkat yaitu 152.490 jiwa yang memiliki presentase 5,23%. Kenaikan presentase penduduk miskin tersebut dipicu karena adanya kenaikan kebutuhan pokok. Pada tahun 2021 indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Kemudian di tahun 2022 angka kemiskinan kembali mengalami penurunan sebanyak 14.280 jiwa dengan jumlah 138.210 presentasinya 4,72%. Dan nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) mengalami kenaikan. Faktor yang mempengaruhi terhadap Tingkat kemiskinan selama periode ini yaitu karena aktifitas Masyarakat sudah mengalami pemulihan dan adanya realisasi penyaluran bantuan program sembako.

Sifat dinamis ini diakibatkan oleh meningkatnya kerentanan kelompok masyarakat yang tinggal di daerah sekitar garis kemiskinan terhadap perubahan demografi masyarakat miskin. Ketika ekonomi secara bertahap membaik di tahun-tahun berikutnya, mereka yang miskin tetap berada di bawah garis kemiskinan dapat dengan mudah terangkat dari kemiskinan. Periode berikutnya akan mengalami sedikit perbaikan ekonomi. Sebaliknya, ketika ekonomi mengalami sedikit kontraksi, mereka yang berada sedikit di atas ambang batas kemiskinan pada periode berikutnya dapat berada di bawahnya.

Oleh karena itu salah satu masalah dalam kemajuan dan masyarakat adalah kemiskinan. Karena kualitas sumber daya manusia yang rendah, produktivitas tenaga kerja menjadi rendah, yang berkontribusi pada masalah kemiskinan. Penduduk mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka karena produktivitas tenaga kerja yang rendah, yang dapat menyebabkan tingkat pendapatan yang rendah. Oleh karena itu, masyarakat miskin beralih ke berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, dan beberapa bahkan beralih ke kegiatan kriminal. Orang miskin biasanya tinggal di daerah miskin, daerah kumuh, dan tempat-tempat dengan norma-norma sosial yang lemah. Karena itu, ada kemungkinan lebih besar terjadinya aktivitas kriminal di lingkungan tersebut dan sering kali menimbulkan banyak perselisihan.

Namun, ada beberapa elemen lain yang perlu diperhatikan terkait masalah kemiskinan di Surabaya. Pertama, tidak semua orang di Surabaya memiliki pekerjaan; beberapa orang bekerja serabutan dengan upah yang lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Akibatnya, tidak semua orang di Surabaya terpengaruh oleh upah minimum. Kedua, seiring dengan meningkatnya upah minimum, biaya hidup juga meningkat. Hal ini berarti kesempatan untuk menabung menjadi hilang karena kebutuhan dasar harus dipenuhi selain dari upah minimum, yang juga harus dikurangi dengan pajak penghasilan dan potongan asuransi karyawan. Ketiga, jumlah pendatang yang datang ke Surabaya tidak sebanding dengan permintaan lapangan pekerjaan, dan pendatang yang tidak memiliki kemampuan beradaptasi dan sumber daya untuk memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal hanya akan meningkatkan angka pengangguran dan dengan demikian akan meningkatkan angka kemiskinan di Surabaya. Keempat, adanya korupsi dalam bantuan pemerintah yang diterima masyarakat.

Fakta bahwa beberapa orang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka secara finansial dapat berdampak buruk bagi penduduk Surabaya. Kebutuhan yang tidak terpenuhi dapat memicu tindakan kriminal, sehingga untuk memenuhinya, orang akan melakukan apa pun, bahkan jika itu berarti melanggar hukum untuk

memenuhinya. seperti penipuan, perampokan, penjambretan, pencurian, dan kejahatan lainnya.

Kegiatan ilegal pada dasarnya adalah produk dari sifat alamiah manusia, yang didorong oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan keinginan untuk mendapatkan lebih banyak uang. Orang-orang yang dibayar rendah untuk pekerjaan mereka terkadang menggunakan aktivitas ilegal untuk mencapai tujuan ini.

Tabel 2 Total Angka Kejahatan Menurut Kelompok Kejahatan di Surabaya Tahun 2018-2022

Kelompok Kejahatan	2018		2019		2020		2021		2022	
	Lapor	Selesai	Lapor	Selesai	Lapor	Selesai	Lapor	Selesai	Lapor	Selesai
Perjudian	215	207	46	51	4	6	5	6	67	59
Penganiayaan Berat	193	173	1	1	1	0	2	0	17	19
Pencurian Dengan Kekerasan	307	172			18	10	15	11	46	41
Pencurian Dengan Pemberatan	559	309	11	7	23	12	21	14	111	121
Pencurian Kendaraan Bermotor	407	147	88	25	73	29	84	26	187	223
Penggelapan	306	179	38	21	38	26	26	33	48	38
Penipuan	738	359	62	43	103	47	103	95	136	143
Narkotika	109	112	185	181	158	158			322	322

Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 kejahatan yang paling banyak dilakukan di Surabaya adalah pencurian pemberatan. Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan pencurian, Faktor pertama yaitu faktor internal seperti dorongan untuk melakukan pencurian karena kondisi ekonomi pelaku. Seseorang cenderung melakukan cara apapun ketika terdesak ingin memenuhi kebutuhan hidupnya dan ketika seseorang telah terbiasa melakukan hal buruk maka hal yang akan dilakukan adalah dengan mencari jalan pintas agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua yaitu faktor eksternal seperti memiliki pergaulan dengan orang-orang yang sering bertindak kriminal. Kemudian pada tahun 2019,2020 dan 2022 kejahatan yang banyak dilakukan di Surabaya yaitu Penggunaan dan Pengeedaran narkotika. Penyebab seseorang mengkonsumsi narkoba pertama yaitu karena faktor lingkungan kedua karena pengguna merasa depresi, tidak percaya diri dan memiliki masalah mental dan untuk pengedar narkoba faktor yang sangat mempengaruhi yaitu karena kondisi ekonomi pengedar yang rendah. Pada tahun 2021 tindak kejahatan yang paling banyak dilakukan adalah penipuan. Karena pada tahun 2021 sudah banyak pembelanjaan berbasis online menjadikan penipuan lebih gampang untuk dilakukan karena identitas pelaku sulit untuk ditemukan. Terjadinya penipuan tersebut karena sifat buruk pelaku yang ingin mendapatkan hasil yang banyak dengan modal yang sedikit.

Gambar 1. Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin di Surabaya (Ribuan Jiwa), terhadap Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan di Surabaya (*Crime Total*). ((Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2019, 2020, 2021); Data diolah)



Berdasarkan gambar 1 dapat terlihat bahwa pada tahun 2018-2021 terjadi penurunan jumlah kejahatan yang dilaporkan di Kota Surabaya, namun di tahun 2020-2021 terjadi kenaikan yang sangat signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, dan setelah tahun 2022 penduduk miskin mengalami penurunan namun Tingkat kejahatan mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini dirasa cukup masuk akal, karena dapat dilihat pada 2019 itu awal mula terjadinya insiden wabah COVID-19 yang melanda secara global. Dan pada tahun 2019 kita menghadapi yang namanya era lockdown secara massif, Dimana banyak sekali Masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan banyak juga instansi pemerintah yang melakukan aktivitasnya dari rumah, hal ini menyebabkan banyak Masyarakat yang hidup dibawah kemiskinan, apalagi proses lockdownnya sendiri berlangsung tahunan. Penurunan angka kejahatan selama pandemi COVID-19 sejalan dengan temuan (Ikram & Fuady, 2022), yang mengindikasikan adanya penurunan jumlah kejahatan dari tahun 2019 hingga saat ini. Mayoritas kejahatan ini bersifat ekonomi. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap penurunan angka kejahatan selama pandemi, antara lain ketidakpastian finansial, kondisi yang damai, dan pengaruh lingkungan sekitar. Dengan demikian, terbukti bahwa epidemi COVID-19 telah berdampak signifikan terhadap kondisi ekonomi, sehingga memicu peningkatan aktivitas kriminal.

Penyebab perilaku kriminal berasal dari dalam diri seseorang, dan dari luar dirinya. Emosi yang tidak terkendali, kurangnya bimbingan moral dari orang-orang terdekat, ketidakmampuan untuk membiayai pendidikan, yang mengubur wawasan dan bakat, usia yang tidak stabil, dan kepribadian yang sulit diatur adalah faktor internal. Keluarga yang disfungsi yang menanamkan perilaku buruk, pekerjaan yang tidak terpenuhi yang mendorong seseorang untuk bertindak buruk untuk memenuhi kebutuhan hidup, lingkungan sosial yang tidak adil yang menciptakan pola perilaku buruk, ekonomi yang buruk yang mengarah pada kesenjangan sosial dan menginspirasi orang untuk bertindak buruk, dan yang terakhir, pengaruh film, yang seharusnya hanya ditonton untuk hiburan tetapi malah digunakan sebagai tempat pelatihan untuk kegiatan kriminal, semuanya adalah contoh dari faktor eksternal yang berkontribusi pada kehadiran kejahatan (Prayetno, 2013)

Adapun untuk pihak yang memangku kebijakan memerlukan perlakuan khusus terhadap intervensi kebijakan, yang mana harus berfokus pada aspek-aspek berikut. Yang pertama adalah memperbaiki iklim ekonomi melalui penciptaan lebih banyak lapangan kerja dan iklim investasi yang lebih baik untuk mengurangi tindakan kriminal. Kedua, membangun sumber daya manusia melalui pendidikan untuk mencegah kejahatan, karena dapat memberikan peluang ekonomi yang lebih baik bagi individu. Ketentuan layanan publik lainnya yang mendukung pembangunan sumber daya manusia juga dapat dijangkau (misalnya, layanan penitipan anak, fasilitas kesehatan, pusat pengembangan masyarakat, pusat pengobatan, jaring jaminan sosial). Ketiga, penting untuk melakukan realokasi belanja infrastruktur ke bidang-bidang yang dapat meningkatkan distribusi pendapatan dan menurunkan kemiskinan. Pertumbuhan belanja infrastruktur yang besar tampaknya memperlebar kesenjangan pendapatan, sehingga menyebabkan lebih banyak tindakan kriminal. Keempat, program kemasyarakatan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sumber daya manusia di kalangan masyarakat kurang mampu diperlukan untuk mencegah tindakan kriminal yang bermotif kelangsungan hidup. Kelima, sistem kepolisian dan peradilan perlu ditingkatkan untuk mencegah tindakan kriminal. Keenam, pengambil kebijakan perlu merealokasi dana pemerintah untuk membantu masyarakat yang hidup dalam kemiskinan dan mereka yang berpenghasilan rendah untuk mengurangi kesenjangan pendapatan di masyarakat. Ketujuh, pertumbuhan ekonomi yang pesat perlu diiringi dengan pemerataan pendapatan untuk meningkatkan pemerataan dan menurunkan angka kemiskinan dan kejahatan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa kemiskinan merupakan masalah kompleks yang memiliki berbagai faktor penyebab, baik internal maupun eksternal. Kemiskinan di Surabaya mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi yang rendah, jumlah pendatang yang berlebihan kesulitan dalam mengakses layanan pemerintah, kondisi lingkungan yang tidak mendukung dan kebijakan pemerintah. Kemiskinan dapat berdampak negatif bagi masyarakat, salah satunya adalah mendorong terjadinya tindakan kriminal. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, sehingga masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan terpaksa melakukan tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhannya.

Sejauh ini, pemerintah belum memberikan bantuan yang signifikan dan sering salah sasaran dalam memberikan bantuannya atau menerapkan langkah-langkah untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kriminalitas. Perekonomian kota Surabaya sangat terpengaruh oleh kemiskinan dan kriminalitas, yang memiliki konsekuensi yang luas seperti meningkatnya pengangguran, meningkatnya risiko konflik sosial, meningkatnya angka kematian, dan menjamurnya pemukiman kumuh. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi kemiskinan, baik dari pemerintah maupun Masyarakat seperti melakukan sosialisasi mengenai pengetahuan cara mengatasi kemiskinan dan akibat dari tindak serta menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Sebagian orang juga melakukan kejahatan karena sanksi yang diberikan tidak sesuai dengan perilaku yang dilakukan oleh pelaku kejahatan maka dari itu pemerintah harus menambah beban sanksi. dan perlu

dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan dan mengurangi angka kriminalitas di Surabaya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arvanites, T. M., & Defina, R. H. (2006). BUSINESS CYCLES AND STREET CRIME. *Criminology*, 44, 139–164.
- BADAN PUSAT STATISTIK KOTA SURABAYA. (2019). *Profil Kemiskinan di Kota Surabaya Tahun 2019*.
- BADAN PUSAT STATISTIK KOTA SURABAYA. (2020). *Profil Kemiskinan Kota Surabaya Maret 2020*.
- BADAN PUSAT STATISTIK KOTA SURABAYA. (2021). *BERITA RESMI STATISTIK: Profil Kemiskinan Maret 2021 Kota Surabaya*.
- Blyth, M. (2013). *Austerity: The History of a Dangerous Idea*. Oxford University Press. .
- Green, D. (2016). The Trump Hypothesis: Testing Immigrant Populations as a Determinant of Violent and Drug-Related Crime in the United States\*. *Social Science Quarterly*, 97(3), 506–524. <https://doi.org/10.1111/ssqu.12300>
- Gull, R. H., Perveen, K., & Basit, A. B. (2020). Macroeconomic Determinants of Crime in South Asian Countries: A Panal Data Approach. *A Research Journal of South Asian Studies*, 35(2), 421–430.
- Hazra, D. (2020). What Does (and Does Not) Affect Crime in India? *International Journal of Social Economics* , 47, 503–521.
- Huay, C. S., & Bani, Y. (2018). Remittances, poverty and human capital: evidence from developing countries. *International Journal of Social Economics*, 45(8), 1227–1235. <https://doi.org/10.1108/IJSE-10-2017-0454>
- Ikram, M., & Fuady, N. (2022). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaku Tindak Kriminal di Kabupaten Gowa. Dalam *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* (Vol. 11).
- Imran, M., Hosen, M., & Chowdhury, M. A. F. (2018). Does poverty lead to crime? Evidence from the United States of America. *International Journal of Social Economics*, 45(10), 1424–1438. <https://doi.org/10.1108/IJSE-04-2017-0167>
- Kang, S. (2016). Inequality and crime revisited: effects of local inequality and economic segregation on crime. *Journal of Population Economics*, 29(2), 593–626. <https://doi.org/10.1007/s00148-015-0579-3>
- Kuciswara, D., Muslihatinningsih, F., & Santoso, E. (2021). Pengaruh urbanisasi, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan terhadap kriminalitas di Provinsi Jawa Timur. *JAE (JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI)*, 6(3), 1–9. <https://doi.org/10.29407/jae.v6i3.16307>
- Lerabeni, M. N. (2022). Pengaruh Kemiskinan Terhadap Kriminalitas di Kota Batam. *JURNAL DIALEKTIKA PUBLIK*, 6(2), 13–20. <http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/dialektikapublik>
- Masterson, D., & Yasenov, V. (2021). Does Halting Refugee Resettlement Reduce Crime? Evidence from the US Refugee Ban. *American Political Science Review*, 115(3), 1066–1073. <https://doi.org/10.1017/S0003055421000150>
- Nguyen, V. B. (2021). The difference in the FDI inflows–Income inequality relationship between developed and developing countries. *Journal of International Trade and Economic Development*, 30(8), 1123–1137. <https://doi.org/10.1080/09638199.2021.1925331>

- Ozden, C., Testaverde, M., & Wagner, M. (2018). How and why does immigration affect crime? Evidence from Malaysia. *World Bank Economic Review*, 32(1), 183–202. <https://doi.org/10.1093/wber/lhx010>
- Pradinie, K. B., & Setiawan, M. A. (2011). *POLA RUANG KRIMINALITAS KOTA STUDI KASUS KOTA SURABAYA* [Universitas Gadjah Mada]. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/515691/4Home>
- Prayetno. (2013). KAUSALITAS KEMISKINAN TERHADAP PERBUATAN KRIMINAL (PENCURIAN). *Media Komunikasi FIS*, 12(1), 30–45. <http://www.google.co.id/memahami>
- Sugiarti, Y. (2014). FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP-MADURA KEMISKINAN SEBAGAI SALAH SATU PENYEBAB TIMBULNYA TINDAK KEJAHATAN. Dalam *FAKULTAS HUKUM UNIJA* (Vol. 1).
- Taufiq, M., & Tambunan, K. (2021). PENGANGGURAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN DELI SERDANG. *Journal Of Management, Accounting, Economic and Business*, 02(04), 543–550. <http://trianglesains.makarioz.org>